

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
MANAJEMEN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DALAM
MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN
SISWA SEKOLAH DASAR

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dapat dimaknai sebagai serangkaian proses yang bertujuan mewujudkan sasaran organisasi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. George R. Terry menyatakan bahwa “*management is a process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling to accomplish objectives*”. Definisi ini menegaskan bahwa manajemen tidak hanya dipahami sebagai sekadar aktivitas, tetapi rangkaian fungsi terpadu yang saling berkaitan dalam menggerakkan sumber daya.

Selain itu, manajemen dipahami sebagai seni dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya agar memberikan hasil optimal. Koontz dan O'Donnell menyebut manajemen sebagai “*the art of getting things done through people*”, yang berarti bahwa keberhasilan manajemen ditentukan oleh kemampuan mengoordinasikan individu dalam organisasi. Dalam konteks pendidikan, manajemen menjadi dasar penting bagi terciptanya proses pembelajaran yang terarah dan bermutu.

Menurut Terry (1953), Manajemen dipahami sebagai suatu mekanisme kerja yang melibatkan pembinaan dan pengarahan sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Proses tersebut mencakup pemahaman mengenai apa yang perlu dilakukan, penetapan langkah-langkah serta cara pelaksanaannya, hingga pengukuran tingkat efektivitas dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pengertian tentang manajemen menurut Luther M Gullick seorang *political scientist* asal Amerika yang juga dikenal sebagai *social scientist*

memberikan definisi manajemen sebagai satu bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara terencana dan sistematis untuk mengkaji alasan serta mekanisme bagaimana individu berinteraksi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan tertentu melalui pembentukan suatu sistem kerja sama.

Manajemen dapat dinilai efektif apabila didukung oleh tujuan dan sasaran yang terdefinisi secara jelas serta dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya, diperlukan perumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut melalui pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, lingkungan, sarana dan prasarana, maupun sumber daya lainnya, secara optimal, efektif, dan efisien. Dengan pengelolaan yang terencana, setiap unsur dapat diatur secara terpadu sehingga terhindar dari tumpang tindih dalam pelaksanaannya

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen sesuai pendapat yang diutarakan oleh George R. Terry (1953), Manajemen dipandang sebagai suatu proses sistematis yang mencakup tahapan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Seluruh tahapan tersebut diarahkan untuk menetapkan sekaligus mewujudkan tujuan organisasi melalui pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan, secara efektif dan optimal.

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam pengertian manajemen Terry, tindakan perencanaan sebagai langkah awal untuk menentukan sasaran organisasi serta mengembangkan berbagai teknik dan strategi untuk mencapainya. Manajemen dalam konteks ini melibatkan pemilihan fakta, asumsi dan perumusan kegiatan untuk masa depan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Manajemen, sesuai pertanyaan GR Terry, mencakup pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai sasaran, penetapan struktur kekuasaan/wewenang serta alokas dan sumber

daya yang diperlukan. Fungsi dari pengorganisasian manajemen memastikan bahwa adanya kerangka yang jelas untuk pelaksanaan kerja.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam aktifitas pergerakan, GR Terry menekankan bahwa manajemen melibatkan usaha untuk mengarahkan, memotivasi anggota organisasi agar dapat bekerja secara optimal dan efektif guna mencapai sasaran yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Fungsi pergerakan dalam manajemen ini implementasi atau aksi nyata dari rencana yang telah disusun melalui proses kepemimpinan, komunikasi juga motivasi dari pimpinan untuk karyawan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Tahapan pengawasan dalam definisi Terry, manajemen tidak lengkap tanpa adanya proses pengukuran dan perbaikan kinerja. Fungsi pengawasan dalam manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, selain itu guna mengidentifikasi adanya penyimpangan juga mengambil tindakan korektif atau perbaikan yang diperlukan untuk mencapai sasaran suatu organisasi.

3. Teori Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan berperan strategis dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan suatu satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola pendidikan dalam mengatur, mengoordinasikan, serta memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, kurikulum, keuangan, serta sarana dan prasarana pendidikan sebagai faktor penunjang utama proses belajar mengajar.

Dalam konteks peningkatan mutu pembelajaran, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran strategis karena berhubungan langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, aman, serta dikelola secara optimal mampu mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung tercapainya

tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pijakan teoretis yang kokoh sebagai acuan dalam manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah.

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam kajian manajemen pendidikan adalah Mulyasa. Pemikirannya menekankan bahwa manajemen pendidikan harus dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Teori manajemen pendidikan menurut Mulyasa (2017) menjadi relevan untuk digunakan sebagai landasan dalam mengkaji pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan dasar.

Mulyasa (2017) menjelaskan bahwa Manajemen pendidikan dipahami sebagai proses pengaturan dan pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menekankan pada upaya peningkatan mutu pembelajaran melalui pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Dalam konteks pengelolaan sarana prasarana pendidikan, Mulyasa (2017) menegaskan bahwa sarana prasarana merupakan komponen strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas pelaksanaan dan capaian pembelajaran. Oleh karena itu, pengelolaannya harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara cermat agar benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Mulyasa menekankan bahwa pengelolaan sarana prasarana pendidikan harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu efektivitas, keselamatan, dan mutu pembelajaran. Prinsip efektivitas menuntut agar sarana prasarana dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pembelajaran, sehingga tidak terjadi pemborosan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran. Prinsip keselamatan mengharuskan setiap fasilitas pendidikan berada dalam kondisi layak pakai, aman, dan tidak membahayakan peserta didik maupun pendidik. Sementara itu, prinsip mutu

pembelajaran menekankan bahwa sarana prasarana harus berperan dalam menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, serta menunjang proses pembelajaran pengembangan potensi peserta didik secara maksimal.

Lebih lanjut, Mulyasa (2017) menyatakan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, hingga penghapusan. Setiap tahapan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan satuan pendidikan serta mengacu pada standar nasional pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, manajemen sarana dan prasarana tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga berfungsi secara strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan

4. Teori Total Quality Management (TQM)

Mutu pendidikan merupakan tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Peningkatan mutu tidak dapat diwujudkan secara cepat, melainkan harus melalui proses pengelolaan yang dirancang secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, sekolah dituntut untuk menerapkan pendekatan manajemen yang berorientasi pada kualitas, kepuasan pemangku kepentingan, serta perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satu pendekatan yang digunakan adalah *Total Quality Management (TQM)*. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh warga sekolah, kerja sama tim, serta komitmen bersama dalam mewujudkan mutu pendidikan yang unggul. Konsep TQM banyak diadaptasi dalam dunia pendidikan karena mampu memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengelola kualitas secara menyeluruh.

Tokoh yang banyak membahas penerapan TQM dalam pendidikan adalah Edward Sallis. Pemikiran Sallis menegaskan bahwa mutu pendidikan merupakan hasil dari proses yang dirancang secara sadar dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh komponen pendidikan. Oleh karena itu, teori

TQM menurut Sallis menjadi landasan penting dalam mengkaji upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Sallis (2012) menjelaskan bahwa *Total Quality Management (TQM)* dalam pendidikan merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui keterlibatan seluruh unsur organisasi pendidikan. Mutu pendidikan tidak dipahami sebagai hasil akhir semata, melainkan sebagai proses yang harus direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi secara sistematis.

Sallis mengemukakan bahwa mutu pendidikan merupakan hasil dari proses yang terencana dan kolaboratif. Proses terencana berarti bahwa setiap kegiatan pendidikan, mulai dari perencanaan pembelajaran, pengelolaan sumber daya, hingga evaluasi hasil belajar, harus dirancang secara matang berdasarkan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Sementara itu, kolaboratif menunjukkan bahwa peningkatan mutu hanya dapat tercapai apabila seluruh unsur warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya terlibat secara aktif dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Sallis (2012) menekankan beberapa prinsip utama dalam penerapan TQM di bidang pendidikan, antara lain berorientasi pada kepuasan pelanggan, yaitu peserta didik dan orang tua, serta kepemimpinan yang visioner, kerja tim, pengambilan keputusan berbasis data, serta perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar setiap proses pendidikan berlangsung sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan.

Dalam konteks pengelolaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, penerapan TQM menurut Sallis memerlukan perencanaan yang disusun secara matang, pemeliharaan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang berkesinambungan. Pengelolaan sarana prasarana yang berbasis mutu akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang efektif, aman, dan nyaman,

sehingga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

5. Teori Kemiteraan Sekolah dan Orang Tua

Kepala sekolah memegang peranan strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab pada aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah secara menyeluruh. Pencapaian tujuan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki sekolah.

Dalam praktiknya, masih ditemui berbagai permasalahan di sekolah yang bersumber dari lemahnya pengelolaan organisasi, kurangnya koordinasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai fondasi dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi seluruh aktivitas sekolah secara profesional dan berorientasi pada mutu.

Salah satu tokoh yang banyak membahas kompetensi kepala sekolah adalah Mulyasa. Teori kompetensi manajerial kepala sekolah menurut Mulyasa (2009) menegaskan bahwa kompetensi manajerial merupakan landasan utama bagi terwujudnya sekolah yang efektif dan berkualitas. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan sebagai dasar teoretis dalam kajian manajemen pendidikan.

Mulyasa (2009) menyatakan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah merujuk pada kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan seluruh sumber daya sekolah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan sekolah.

Menurut Mulyasa, kompetensi manajerial kepala sekolah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial yang baik mampu menyusun perencanaan sekolah yang jelas, mengembangkan struktur organisasi yang fungsional, memberdayakan guru dan tenaga kependidikan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Di samping itu, kepala sekolah juga dituntut mampu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan mutu sekolah.

Lebih lanjut, Mulyasa (2009) menyatakan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah mencakup sejumlah aspek krusial, di antaranya kemampuan dalam merumuskan perencanaan strategis sekolah, mengelola kurikulum dan proses pembelajaran, mengelola peserta didik, mengelola sarana dan prasarana, mengelola keuangan, serta membangun dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan secara kolektif berperan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Dalam konteks peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi manajerial kepala sekolah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya sekolah, termasuk sarana prasarana dan sumber daya manusia, dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kompetensi manajerial kepala sekolah menurut Mulyasa (2009) menjadi dasar yang kuat dalam membangun sekolah yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

6. Teori Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah

Kepala sekolah memegang peranan strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab pada aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah secara menyeluruh. Pencapaian tujuan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh

kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki sekolah.

Dalam praktiknya, masih ditemui berbagai permasalahan di sekolah yang bersumber dari lemahnya pengelolaan organisasi, kurangnya koordinasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai fondasi dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi seluruh aktivitas sekolah secara profesional dan berorientasi pada mutu.

Salah satu tokoh yang banyak membahas kompetensi kepala sekolah adalah Mulyasa. Teori kompetensi manajerial kepala sekolah menurut Mulyasa (2009) menegaskan bahwa kompetensi manajerial merupakan landasan utama bagi terwujudnya sekolah yang efektif dan berkualitas. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan sebagai dasar teoretis dalam kajian manajemen pendidikan.

Mulyasa (2009) menyatakan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah merujuk pada kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan seluruh sumber daya sekolah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan sekolah.

Menurut Mulyasa, kompetensi manajerial kepala sekolah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial yang baik mampu menyusun perencanaan sekolah yang jelas, mengembangkan struktur organisasi yang fungsional, memberdayakan guru dan tenaga kependidikan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Di samping itu, kepala sekolah juga dituntut mampu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan mutu sekolah.

Lebih lanjut, Mulyasa (2009) menyatakan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah mencakup sejumlah aspek krusial, di antaranya kemampuan dalam merumuskan perencanaan strategis sekolah, mengelola kurikulum dan proses pembelajaran, mengelola peserta didik, mengelola sarana dan prasarana, mengelola keuangan, serta membangun dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan secara kolektif berperan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Dalam konteks peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi manajerial kepala sekolah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya sekolah, termasuk sarana prasarana dan sumber daya manusia, dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kompetensi manajerial kepala sekolah menurut Mulyasa (2009) menjadi dasar yang kuat dalam membangun sekolah yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

7. Teori Transformasi Pendidikan

Perkembangan dan dinamika pendidikan yang terus berubah menuntut sekolah untuk senantiasa beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sekolah tidak lagi cukup dikelola dengan pendekatan konvensional, tetapi memerlukan kepemimpinan yang mampu melakukan transformasi secara berkelanjutan. Transformasi pendidikan menjadi kunci dalam menjawab tantangan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di era perubahan yang cepat.

Dalam proses transformasi pendidikan, peran kepala sekolah sangat menentukan arah dan keberhasilan perubahan yang dilakukan. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin perubahan yang mampu mendorong lahirnya inovasi serta mengelola dinamika perubahan secara efektif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang akurat. Kepemimpinan

transformasional kepala sekolah menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah dan mutu pembelajaran.

Salah satu teori yang relevan dalam membahas transformasi pendidikan dikemukakan oleh Suyanto dan Asep Jihad. Teori Transformasi Pendidikan menurut Suyanto dan Asep Jihad (2013) menegaskan bahwa kepala sekolah berperan sebagai inovator dan pengambil keputusan berbasis data dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai landasan teoretis dalam kajian manajemen dan kepemimpinan pendidikan.

Suyanto dan Asep Jihad (2013) menjelaskan bahwa transformasi pendidikan merupakan proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan guna meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing sekolah. Transformasi pendidikan tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja, pola pikir, serta praktik pembelajaran di sekolah.

Menurut Suyanto dan Asep Jihad, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai inovator dalam mendorong pembaruan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu menciptakan ide-ide baru, mengembangkan program inovatif, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi yang dilakukan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan perkembangan lingkungan pendidikan.

Selain sebagai inovator, kepala sekolah juga berperan sebagai pengambil keputusan berbasis data. Suyanto dan Asep Jihad (2013) menekankan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah seharusnya didasarkan pada data yang valid dan objektif, seperti hasil evaluasi pembelajaran, kinerja guru, kondisi sarana prasarana, serta kebutuhan peserta didik. Pendekatan berbasis data memungkinkan kepala sekolah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu sekolah.

Dalam konteks manajemen pendidikan, teori transformasi pendidikan menurut Suyanto dan Asep Jihad menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Dengan menjalankan peran sebagai inovator dan pengambil keputusan berbasis data, kepala sekolah dapat mendorong terwujudnya sekolah yang efektif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

8. Model Analisis Data Interaktif

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui model analisis data interaktif, yaitu proses analisis yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan antara pengumpulan data dan penafsiran data. Model ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data merupakan tahapan pengolahan data yang mencakup kegiatan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengolah data awal yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyaringan terhadap data yang sesuai dengan fokus penelitian, mengklasifikasikan data berdasarkan tema tertentu, serta mengeliminasi data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Proses reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian.

Display data adalah tahap penyajian data dalam bentuk yang terorganisasi sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan makna dari data yang telah direduksi. Penyajian data dapat berupa matriks, tabel, bagan, atau narasi deskriptif. Melalui display data, peneliti dapat melihat gambaran menyeluruh terhadap temuan penelitian sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data interaktif. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antarvariabel. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat final sejak

awal, tetapi terus diverifikasi melalui pengumpulan data tambahan hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman, peneliti dapat melakukan analisis data kualitatif secara sistematis, mendalam, dan berkelanjutan. Model ini memungkinkan peneliti menghasilkan temuan penelitian yang kredibel serta mendukung penarikan kesimpulan yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian

B. Landasan Konsep dan Teori Pendukung

1. Manajemen Strategi Sekolah

Manajemen strategi sekolah merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pimpinan sekolah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen strategi tidak hanya berfokus pada perencanaan jangka panjang, tetapi juga menekankan pada kemampuan sekolah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan pendidikan (David, 2011; Sagala, 2013).

Dalam manajemen strategi sekolah, terdapat beberapa tahapan utama, yang meliputi tahapan perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi strategi. Tahap perumusan strategi mencakup penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah, disertai dengan analisis terhadap kondisi internal maupun eksternal sekolah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sekolah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan strategis (Wheelen & Hunger, 2012).

Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan rencana strategis yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, kepala sekolah berperan penting dalam mengoordinasikan seluruh warga sekolah, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan strategis sekolah. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah, komitmen warga sekolah, serta komunikasi yang efektif (Mulyasa, 2009; Sagala, 2013).

Evaluasi strategi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan sekolah. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan kinerja, pengukuran hasil program, serta analisis terhadap hambatan yang dihadapi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan strategi agar sekolah mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (David, 2011; Mulyasa, 2017).

Dengan demikian, manajemen strategi sekolah merupakan pendekatan penting dalam mewujudkan sekolah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran serta mutu lulusan.

2. Mutu Lulusan (akademik & non-akademik)

Mutu lulusan merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Mutu lulusan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik semata, tetapi juga mencakup aspek non-akademik yang berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan karakter peserta didik. Lulusan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki keseimbangan antara kemampuan intelektual, keterampilan sosial, serta nilai-nilai karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Sallis, 2012; Mulyasa, 2017).

Mutu lulusan akademik berkaitan dengan pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan berpikir peserta didik yang tercermin dalam hasil belajar, nilai evaluasi, prestasi akademik, serta kemampuan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pencapaian akademik yang baik menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah berlangsung secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Sagala, 2013).

Sementara itu, mutu lulusan non-akademik mencakup aspek sikap, karakter, keterampilan sosial, kepemimpinan, kemandirian, serta prestasi di bidang seni, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler. Aspek non-akademik berperan penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang utuh dan siap beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan mutu non-akademik mencerminkan keberhasilan sekolah dalam membina nilai-nilai moral, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik (Mulyasa, 2017).

Dengan demikian, mutu lulusan akademik dan non-akademik merupakan hasil dari proses pendidikan yang terencana dan berkelanjutan. Sekolah yang mampu mengelola pembelajaran, kepemimpinan, dan sumber daya secara efektif akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan hidup yang memadai (Sallis, 2012).

3. Partisipasi Orang Tua

Partisipasi orang tua merupakan keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Partisipasi ini mencakup dukungan terhadap kegiatan pembelajaran, komunikasi dengan pihak sekolah, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan peserta didik. Keterlibatan orang tua dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan mutu hasil belajar peserta didik (Epstein, 2002; Mulyasa, 2017).

Menurut Epstein (2002), partisipasi orang tua dalam pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan akademik, sikap, dan perilaku peserta didik. Keterlibatan orang tua yang terencana dan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan, serta prestasi peserta didik. Selain itu, partisipasi orang tua juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan kesiapan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Dalam konteks manajemen pendidikan, partisipasi orang tua dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, dukungan pembelajaran di rumah, serta partisipasi dalam forum pengambilan keputusan sekolah. Partisipasi yang baik mencerminkan adanya kemitraan yang harmonis antara sekolah dan keluarga dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Sagala, 2013).

Dengan demikian, partisipasi orang tua merupakan komponen strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Sekolah

yang mampu membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua akan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkelanjutan (Epstein, 2002; Sallis, 2012).

4. Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan

Pengelolaan sarana prasarana pendidikan merupakan proses pengaturan dan pemanfaatan seluruh fasilitas pendidikan secara sistematis guna mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sarana prasarana pendidikan meliputi segala bentuk peralatan, perlengkapan, bangunan, dan lingkungan sekolah yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pendidikan (Mulyasa, 2017).

Pengelolaan sarana prasarana yang baik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan dan penghapusan. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa sarana prasarana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan standar pendidikan. Pengadaan dan pemanfaatan harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi, sedangkan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kondisi sarana prasarana agar tetap layak dan aman digunakan (Bafadal, 2014).

Mulyasa (2017) menegaskan bahwa pengelolaan sarana prasarana pendidikan harus memperhatikan prinsip efektivitas, keselamatan, dan mutu pembelajaran. Sarana prasarana yang dikelola secara efektif dan aman akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kenyamanan warga sekolah, serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.

Dengan demikian, pengelolaan sarana prasarana merupakan komponen penting dalam manajemen sekolah. Sekolah yang mampu mengelola sarana prasarana secara profesional dan berkelanjutan akan lebih efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lulusan (Mulyasa, 2017; Sagala, 2013).

5. Evaluasi Berkelanjutan

Evaluasi berkelanjutan merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk menilai efektivitas program, proses, dan hasil penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

Dalam konteks manajemen pendidikan, evaluasi berkelanjutan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menilai proses pelaksanaan program secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan secara periodik melalui pengumpulan data, analisis kinerja, serta refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah. Pendekatan ini memungkinkan sekolah untuk mendeteksi secara dini berbagai hambatan dan melakukan perbaikan secara tepat dan berkelanjutan (Mulyasa, 2017).

Evaluasi berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Melalui evaluasi yang konsisten dan berbasis data, sekolah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, memperbaiki kualitas pembelajaran, serta memastikan tercapainya standar mutu pendidikan. Evaluasi yang berkelanjutan juga sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu pendidikan (Sallis, 2012).

Dengan demikian, evaluasi berkelanjutan merupakan komponen strategis dalam manajemen sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

6. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan tolok ukur minimum yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia dan berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan guna mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas. SNP menjadi acuan bagi setiap satuan pendidikan dalam menyelenggarakan

pendidikan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2021).

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas delapan komponen utama, meliputi: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, serta (8) standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Dalam konteks manajemen sekolah, SNP berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program sekolah. Penerapan SNP secara konsisten akan membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta mutu lulusan baik secara akademik maupun non-akademik (Mulyasa, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, Standar Nasional Pendidikan merupakan landasan normatif yang penting dalam menjamin mutu pendidikan. Sekolah yang mampu memenuhi dan melampaui SNP menunjukkan kinerja pengelolaan pendidikan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

7. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah berfungsi untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah (Republik Indonesia, 2016).

Dalam pelaksanaannya, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui peran tersebut, komite sekolah turut berkontribusi dalam perencanaan

program sekolah, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta mobilisasi dukungan sumber daya pendidikan (Mulyasa, 2017).

Komite sekolah juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah, terutama dalam aspek pembiayaan, pengelolaan sarana prasarana, dan pelaksanaan program peningkatan mutu. Keterlibatan komite sekolah yang aktif dan konstruktif dapat memperkuat kemitraan antara sekolah dan masyarakat sehingga menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan partisipatif (Sagala, 2013).

Dengan demikian, komite sekolah merupakan komponen penting dalam sistem manajemen sekolah. Keberadaan dan peran komite sekolah yang efektif akan mendukung kepemimpinan kepala sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan mutu lulusan.

8. Profesionalisme Tenaga Pendidik

Profesionalisme tenaga pendidik merupakan kemampuan dan komitmen guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya secara bertanggung jawab sesuai dengan standar dan etika profesi. Guru sebagai tenaga pendidik profesional dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan proses pendidikan (Republik Indonesia, 2005).

Profesionalisme tenaga pendidik tercermin dalam kemampuan guru menyusun perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif. Guru yang profesional memiliki kemampuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, inovatif, dan berpusat pada peserta didik, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Profesionalisme guru berpengaruh langsung terhadap kualitas proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar peserta didik (Mulyasa, 2017).

Selain itu, profesionalisme tenaga pendidik juga ditunjukkan melalui sikap tanggung jawab, komitmen terhadap pengembangan diri, serta

kesediaan untuk terus meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan lebih adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, dan mampu mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Sagala, 2013).

Dengan demikian, profesionalisme tenaga pendidik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Sekolah yang didukung oleh tenaga pendidik yang profesional akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan

9. Kolaborasi dan Kemitraan Sekolah dan Keluarga

Kolaborasi dan kemitraan antara sekolah dan keluarga merupakan bentuk kerja sama yang terencana dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan pendidikan peserta didik. Sekolah dan keluarga memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk perkembangan akademik, karakter, dan keterampilan sosial peserta didik. Oleh karena itu, kemitraan sekolah–keluarga menjadi komponen penting dalam peningkatan mutu pembelajaran dan mutu lulusan (Epstein, 2002).

Kemitraan sekolah–keluarga diwujudkan melalui komunikasi yang efektif, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, serta dukungan pembelajaran di rumah. Epstein (2002) menegaskan bahwa keterlibatan orang tua yang sistematis dan berkesinambungan memiliki pengaruh langsung terhadap prestasi belajar, motivasi, dan perilaku peserta didik. Kolaborasi yang baik juga memperkuat kepercayaan antara sekolah dan orang tua dalam mendukung program pendidikan.

Dalam konteks manajemen pendidikan, kolaborasi sekolah–keluarga berperan sebagai strategi untuk memperluas dukungan sumber daya dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kepala sekolah dan guru memiliki peran penting dalam membangun kemitraan yang harmonis melalui perencanaan program, pelibatan orang tua dalam pengambilan keputusan,

serta evaluasi bersama terhadap perkembangan peserta didik (Mulyasa, 2017).

Dengan demikian, kolaborasi dan kemitraan sekolah–keluarga merupakan faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sekolah yang mampu membangun kemitraan yang kuat dengan keluarga akan lebih berhasil dalam meningkatkan mutu pembelajaran, pembentukan karakter, dan mutu lulusan secara berkelanjutan (Sallis, 2012).

10. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Pengambilan keputusan berbasis data merupakan proses penentuan kebijakan dan tindakan manajerial yang didasarkan pada analisis data yang akurat, relevan, dan objektif. Dalam konteks pendidikan, data digunakan sebagai dasar untuk memahami kondisi sekolah, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan keputusan yang tepat guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan sekolah secara keseluruhan (Suyanto & Jihad, 2013).

Pengambilan keputusan berbasis data menuntut sekolah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis berbagai jenis data pendidikan, seperti hasil belajar peserta didik, kinerja guru, kehadiran, kondisi sarana prasarana, serta hasil evaluasi program sekolah. Data tersebut menjadi dasar bagi kepala sekolah dalam menetapkan prioritas program, menyusun perencanaan strategis, dan melakukan perbaikan berkelanjutan secara terarah dan terukur (Mulyasa, 2017).

Dalam kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan pengambilan keputusan berbasis data. Kepala sekolah yang mampu memanfaatkan data secara efektif akan lebih objektif, transparan, dan akuntabel dalam menentukan kebijakan sekolah. Pendekatan ini juga mendukung terciptanya budaya sekolah yang reflektif dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (Sallis, 2012).

Dengan demikian, pengambilan keputusan berbasis data merupakan komponen strategis dalam manajemen dan kepemimpinan sekolah. Penerapan keputusan berbasis data memungkinkan sekolah meningkatkan

efektivitas program, mutu pembelajaran, serta mutu lulusan secara berkelanjutan.

11. Sarana prasarana pendidikan

Sarana pendidikan secara konseptual merujuk pada berbagai fasilitas dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan, seperti ruang belajar, buku ajar, perpustakaan, dan laboratorium. Sementara itu, prasarana pendidikan mencakup fasilitas pendukung yang tidak dimanfaatkan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, tetapi berperan penting dalam menunjang proses pendidikan, antara lain lokasi sekolah, lingkungan pendidikan, lapangan olahraga, serta dukungan pendanaan. Dengan demikian sarana prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai penunjang utama terlaksananya proses pembelajaran secara efektif. Sarana pendidikan merujuk pada segala bentuk alat, media, dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan prasarana pendidikan mencakup fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lingkungan sekolah. Keberadaan sarana prasarana pendidikan yang memadai menjadi prasyarat terciptanya proses pembelajaran yang kondusif dan bermakna.

Ibrahim Bafadal (2014) menyatakan bahwa Sarana dan prasarana pendidikan merupakan keseluruhan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses pendidikan, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran serta pencapaian tujuan pendidikan. maupun tidak langsung mendukung terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. Bafadal menegaskan bahwa ketersediaan sarana prasarana pendidikan harus diikuti dengan pengelolaan yang baik agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mulyasa (2013) menjelaskan bahwa sarana prasarana pendidikan memiliki peran strategis dalam

mendukung efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Mulyasa, fasilitas pendidikan yang memadai memungkinkan guru untuk melaksanakan pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan sarana prasarana pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2007) menegaskan bahwa sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Sarana prasarana pendidikan tidak hanya dinilai dari segi jumlah, tetapi juga dari aspek kualitas, kelayakan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran. Pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, sarana prasarana pendidikan dipandang sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara profesional. Bafadal (2014) menekankan bahwa pengelolaan sarana prasarana pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan secara sistematis. Pengelolaan yang baik akan menjamin fasilitas pendidikan selalu berada dalam kondisi siap pakai dan mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Keberadaan sarana prasarana pendidikan yang memadai memiliki keterkaitan erat dengan mutu pembelajaran. Mulyasa (2013) menegaskan bahwa lingkungan belajar yang didukung oleh fasilitas yang layak akan meningkatkan motivasi belajar, kenyamanan, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sarana prasarana pendidikan tidak dapat dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai faktor penting yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Sehingga pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang efektif dan berkelanjutan akan menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar.

Secara teoritis, manajemen sarana prasarana pendidikan berlandaskan pada sejumlah pendekatan, baik yang bersumber dari teori manajemen pendidikan maupun teori pembelajaran dan lingkungan belajar. Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kerangka konseptual dalam memahami bagaimana sarana prasarana pendidikan dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan agar mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif.

a. Teori Psikologi Humanistik

Pendekatan psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang secara optimal apabila berada dalam lingkungan yang mendukung kebutuhan fisik dan psikologisnya. Dalam konteks manajemen sarana prasarana pendidikan, teori ini menggarisbawahi pentingnya penyediaan fasilitas sekolah yang aman, nyaman, dan manusiawi. Sarana prasarana yang memadai memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar peserta didik, seperti rasa aman dan kenyamanan, sehingga mereka dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, termasuk aktualisasi diri dalam proses pembelajaran.

b. Teori Behavioristik

Teori behavioristik memandang pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya stimulus dan respons. Dalam perspektif ini, sarana prasarana pendidikan berfungsi sebagai stimulus yang memengaruhi perilaku belajar peserta didik. Pengelolaan fasilitas pembelajaran seperti media, alat peraga, dan ruang belajar yang tertata dengan baik akan mendorong terbentuknya respons belajar yang positif, seperti meningkatnya perhatian, keterlibatan, dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran.

c. Teori Kognitif

Teori kognitif menekankan pentingnya proses mental internal dalam pembelajaran, seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Manajemen sarana prasarana pendidikan yang baik menyediakan lingkungan dan fasilitas yang mendukung proses kognitif peserta didik, misalnya melalui ketersediaan perpustakaan, media pembelajaran, dan ruang belajar yang kondusif. Fasilitas tersebut membantu siswa dalam mengolah informasi secara lebih efektif dan mendalam.

d. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme, yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks ini, sarana prasarana pendidikan berperan sebagai wahana bagi siswa untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan berinteraksi. Pengelolaan fasilitas seperti laboratorium, media praktik, dan ruang belajar kolaboratif memungkinkan peserta didik membangun pemahaman secara mandiri dan bermakna.

e. Teori Lingkungan Belajar (*Learning Environment Theory*)

Teori lingkungan belajar menegaskan bahwa kondisi fisik lingkungan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap proses dan hasil belajar. Manajemen sarana prasarana pendidikan yang memperhatikan aspek tata ruang, pencahayaan, kebersihan, dan kenyamanan akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang baik akan meningkatkan motivasi, konsentrasi, dan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran.

Berdasarkan pendekatan psikologi dan teori pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan memiliki dasar teoretis yang kuat dalam mendukung proses pembelajaran. Pengelolaan fasilitas pendidikan dengan memperhatikan aspek psikologis dan pedagogis akan menciptakan lingkungan belajar

yang efektif, meningkatkan keterlibatan peserta didik, serta berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

12. Mutu Pembelajaran

a. Pengertian Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran merupakan konsep sentral dalam penyelenggaraan pendidikan karena menjadi tolok ukur keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Mutu pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir berupa nilai atau capaian akademik peserta didik, melainkan mencakup keseluruhan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, mutu pembelajaran merefleksikan sejauh mana proses belajar mengajar mampu memfasilitasi peserta didik untuk berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dengan kata lain mutu pembelajaran merupakan indikator utama keberhasilan proses pendidikan yang mencerminkan kualitas interaksi antara pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, metode, serta lingkungan belajar. Mutu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dan karakteristik peserta didik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, Sallis menegaskan bahwa mutu pembelajaran berkaitan erat dengan kualitas input, proses, dan output pendidikan. Sarana prasarana pendidikan termasuk ke dalam komponen input yang memiliki kontribusi signifikan dalam menunjang keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif (Sallis, 2012).

Dengan demikian ketersediaan ruang kelas yang layak, media pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Menurut Mulyasa Pembelajaran yang bermutu hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sarana prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Sarana pembelajaran seperti alat peraga, media

pembelajaran, dan teknologi pendidikan memungkinkan guru menyampaikan materi secara lebih variatif, interaktif, dan kontekstual, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan (Mulyasa, 2013).

Pandangan senada dikemukakan oleh Ibrahim Bafadal, yang menegaskan bahwa pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang efektif dan efisien merupakan salah satu faktor penentu mutu pembelajaran. Sarana prasarana pendidikan yang direncanakan, diadakan, dimanfaatkan, dan dipelihara dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan (Bafadal, 2014).

Mutu pembelajaran ditinjau dari perspektif Standar Nasional Pendidikan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mutu pembelajaran terkait dengan standar proses, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar penilaian. Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang memenuhi standar prosedural dan substansial, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut hasil penilaian. Guru berperan sebagai perancang, fasilitator, dan evaluator pembelajaran yang menyediakan pengalaman belajar secara sistematis dan berpihak pada perkembangan peserta didik.

C. Landasan Enam Sistem Nilai

Landasan enam sistem nilai yang dikemukakan oleh Sanusi, Achmad (2017:34) menyatakan, berpikir secara sistemik melampaui sekadar identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan nilai, melainkan bagaimana nilai diimplementasikan dalam kehidupan manusia dan berperan sebagai landasan serta pedoman tindakan. Lebih lanjut Sanusi, menyampaikan untuk mewujudkan enam sistem nilai maka kita harus memiliki komitmen untuk membangun hidup yang bernilai. Enam sistem nilai tersebut adalah nilai teologik, nilai fisiologi, nilai logik, nilai etika, nilai Estetika, dan nilai teleologi.

1. Nilai Teologik

Nilai teologik bersumber dari ajaran agama dan keyakinan spiritual yang dianut oleh individu atau kelompok. Nilai ini menjadi pedoman dalam memahami hubungan manusia dengan Tuhan, menjalankan perintah agama, serta menjauhi laranganNya. Dalam praktiknya, nilai teologik membentuk karakter seperti ketakwaan, kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur. Nilai ini juga menjadi landasan moral yang mengarahkan perilaku manusia agar sejalan dengan kehendak Tuhan dan menciptakan ketenteraman batin. Nilai telogik merupakan wujud dari impelementasi manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai manusia wajib mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya.

2. Nilai Fisiologik

Nilai fisiologik ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk biologis, seperti kesehatan, keamanan, kebugaran, makanan, istirahat, dan kenyamanan fisik. Sistem nilai ini menekankan bahwa kesejahteraan jasmani merupakan dasar bagi manusia untuk dapat berpikir, belajar, dan bekerja secara optimal. Dalam konteks pendidikan atau organisasi, nilai fisiologik tercermin dalam penyediaan lingkungan yang sehat, aman, serta nyaman sehingga mendukung produktivitas dan perkembangan individu. Nilai

3. Nilai Etik

Nilai etik merupakan nilai yang mengatur perilaku manusia berdasarkan standar moral mengenai apa yang dianggap benar, baik, atau layak dilakukan. Nilai ini meliputi prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan integritas. Nilai etik berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing individu dalam membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain, serta menghadapi dilema moral dalam berbagai situasi. Dengan kata lain, nilai etik membantu manusia menjalani kehidupan sosial secara harmonis dan bermartabat.

4. Nilai Teleologik

Nilai teleologik berfokus pada tujuan atau hasil akhir dari suatu tindakan. Sistem nilai ini menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat, dampak, atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam kerangka teleologis, suatu perbuatan dipandang baik apabila mampu menghasilkan hasil positif atau mencapai tujuan yang bermanfaat. Nilai ini banyak digunakan dalam penetapan kebijakan, perencanaan, serta pengambilan keputusan strategis, di mana orientasi pada hasil menjadi pertimbangan utama.

5. Nilai Logik

Nilai logik berhubungan dengan akal pikiran manusia yang rasionalitas, penalaran, dan proses berpikir yang benar. Nilai ini menekankan pentingnya kebenaran ilmiah, konsistensi argumen, objektivitas, serta kemampuan menggunakan logika untuk memahami dan memecahkan masalah. Dalam sistem nilai logik, keputusan dan kesimpulan harus didasarkan pada data, fakta, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai ini sangat penting dalam dunia pendidikan, penelitian, dan proses pengambilan keputusan yang memerlukan pemikiran kritis.

6. Nilai Estetik

Nilai estetika berkaitan dengan konsep keindahan, harmoni, dan pengalaman artistik yang menyenangkan secara inderawi maupun emosional. Nilai ini mendorong manusia untuk mengapresiasi seni, kreativitas, dan segala bentuk keindahan dalam kehidupan, baik dalam bentuk visual, suara, gerak, maupun ekspresi lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai estetika terlihat dalam cara seseorang menata lingkungan, menghargai karya seni, hingga menciptakan suasana yang menyenangkan dan inspiratif.

Dari ke enam landasan sistem nilai tersebut, penulis akan lebih fokus pada nilai teleologik dan nilai estetik.

D. Landasan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara

demokratis, adil, dan non-diskriminatif dengan menghargai keberagaman potensi, minat, serta kemampuan peserta didik. Ketentuan ini menjadi landasan bahwa proses pembelajaran perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi standar nasional yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa setiap satuan pendidikan wajib mengelola proses pembelajaran dan sumber daya pendidikan secara sistematis untuk menjamin mutu pendidikan
3. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur kedudukan, peran, dan fungsi komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan komite sekolah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan pendidikan melalui penguatan kemitraan antara sekolah dan masyarakat
4. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana mengatur kriteria minimal sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sebagai pendukung utama terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, aman, dan inklusif. Standar sarana dan prasarana mencakup ketentuan mengenai jenis, kelayakan, keselamatan, aksesibilitas, serta pemanfaatan fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan satuan pendidikan.
5. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2025 mengatur kebijakan, mekanisme, serta tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Pendidikan yang

dialokasikan kepada pemerintah daerah. DAK Fisik Pendidikan diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan peningkatan standar sarana dan prasarana pendidikan, khususnya rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan sesuai standar nasional. Juknis ini menjadi acuan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam memastikan pemanfaatan dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran dan mutu lulusan

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting dalam memperkuat landasan teoretis dan mengidentifikasi posisi penelitian yang sedang dikembangkan. Berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran mengenai konsep, pendekatan, serta temuan empiris yang relevan dengan fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan sejumlah penelitian atau naskah ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut menunjukkan adanya perbedaan atau distingsi dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhasil diidentifikasi oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Relevansi dengan Manajemen sarana prasarana & mutu pembelajaran
1.	Andini, S., Rahma, H. I. A., & Faizin, M. (2024)	Pengelolaan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada peserta didik di era digital abad ke-21	Pengelolaan sarpras dan pemanfaatan TIK	Menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana yang terencana (perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan) berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar, interaksi guru-siswa, variasi metode pembelajaran, serta efektivitas penyampaian materi.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Relevansi dengan Manajemen sarana prasarana & mutu pembelajaran
2.	Anggraini, D. R. M., et al. (2024)	Implementasi manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN Lidah Wetan 04 Surabaya	Implementasi manajemen sarpras di sekolah dasar	Membuktikan bahwa pengelolaan sarana prasarana melalui perencanaan, inventarisasi, dan pemeliharaan berdampak pada peningkatan kenyamanan kelas dan keteraturan pembelajaran, yang berimplikasi pada mutu pembelajaran siswa.
3.	Engkana, A. A. M., et al. (2024)	Manajemen perencanaan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SLB Negeri Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H.	Perencanaan sarpras	Menunjukkan bahwa perencanaan sarana prasarana yang berbasis analisis kebutuhan meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran, sehingga berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.
4.	Zapira, R., Suryana, S., & Saprialman (2025)	Manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Islam Darurrahim Jakarta Timur	Manajemen sarpras dan media pembelajaran	Menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana seperti proyektor dan media audiovisual mampu meningkatkan minat belajar dan kualitas pembelajaran siswa, meskipun masih terkendala keterbatasan jumlah fasilitas.
5.	Murniyanto, Arista, H., & Sartika, D. (2024)	Problematika manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran	Problematika sarpras	Menegaskan bahwa keterbatasan sarana prasarana pendidikan menghambat pembelajaran praktik, sehingga mutu pembelajaran tidak dapat optimal meskipun metode dan kurikulum telah diperbaiki.
6.	Azizah, A. N. I., et al. (2024)	Pengelolaan sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDIT Nurul Istiqlal Wonosari	Pengelolaan sarpras secara menyeluruh	Membuktikan bahwa pengelolaan sarana prasarana yang sistematis dan berkelanjutan meningkatkan motivasi belajar, kreativitas guru, interaksi kelas, serta hasil belajar siswa.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Relevansi dengan Manajemen sarana prasarana & mutu pembelajaran
7.	Sandi, Q., & Fauzi, H. (2023)	Manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran taman kanak-kanak	Sarpras pendidikan anak usia dini	Menunjukkan bahwa pengelolaan sarana prasarana yang tepat mendukung keaktifan dan perkembangan kognitif anak, sehingga mutu pembelajaran pada jenjang TK meningkat.
8.	Noverisky, T. P. (2025)	Manajemen sarana prasarana pendidikan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran	Peran kepala sekolah dalam manajemen sarpras	Menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sarana prasarana berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa.
9.	Wigianti, Palupi, A. P. D., & Fadhil, I. (2024)	Manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 22 Kota Pagar Alam	Pengelolaan sarpras di SD negeri	Menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dasar mendukung pembelajaran, namun keterbatasan prasarana pendukung membatasi optimalisasi pembelajaran praktik dan mutu pembelajaran.
10.	Yaqin, M. A. (2025)	Manajemen sarana prasarana dalam peningkatan mutu pembelajaran di MAN 8 Jombang	Manajemen sarpras dan pengembangan mutu	Menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana yang efektif melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkontribusi langsung pada peningkatan mutu pembelajaran dan hasil akademik siswa.